

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Organisasi gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan yang mewujudkan akuntabilitas keuangannya melalui laporan dan pelaporan keuangan (PSAK No. 45 tahun 2011). Kajian akuntabilitas tentang organisasi *non profit* meskipun telah banyak dilakukan namun kajian tersebut tidak berkembang seperti pada kajian akuntansi bidang sektor privat (Zietlow, 1989). Mengembangkan akuntansi dan akuntabilitas dalam organisasi *non profit* kurang menarik bagi para akuntan karena secara materiil kurang memberikan kontribusi penghasilan dan hanya dikerjakan secara suka rela sehingga hasilnya tidak optimal (Fransiskus, 2011).

Praktik akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan bagi setiap organisasi *profit* atau *non profit* karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Penelitian yang dilakukan Komang, dkk (2015) digereja kerasulan distrik Jawa Timur dan Bali pengelolaan keuangan gereja pengelolaan keuangan gereja Kerasulan sudah dijamin pertanggungjawaban oleh penerapan sistem akuntansi berbasis teologi dan pelibatan tenaga profesional dalam pengelolaan keuangan Gereja Pusat. Akuntabilitas keuangan gereja ini juga sudah mencakup unsur transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas. Penelitian lain dilakukan Randa (2011) meneliti dalam

konteks organisasi katolik paroki, praktik akuntabilitas tata kelola harta benda gerejawi dijalankan oleh Gereja Paroki adalah setengah hati, meskipun pertanggung jawabannya kepada umat sudah secara transparan dengan mengumumkan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada setiap hari minggu. Penelitian akuntansi dan akuntabilitas pada organisasi Gereja banyak sudah banyak dilakukan oleh Laughlin (1988 & 1990), Booth (1993), Duncan *et al.* (1999). Lightbody (200 & 2001), Jacobs & Walker (2000) dan Berry (2005).

Berbagai penelitian yang dilakukan di Gereja Kerasulan, Gereja Katolik, ataupun Gereja Pantekosta didapatkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditemukan masih kurang. Peneliti melihat penelitian akuntabilitas keuangan Gereja hanya dilakukan di Gereja Katolik, Pantekosta, dan Gereja Kerasulan. Ide penelitian muncul bermula dari peneliti melihat mengapa penelitian tentang akuntabilitas keuangan gereja kebanyakan dilakukan di Gereja Katolik, Gereja Kerasulan, dan Gereja Pantekosta. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas keuangan di Gereja Protestan, dalam hal ini objek yang ingin diteliti akuntabilitas keuangan Gereja Protestan yang ada di Kota Gorontalo. Dalam objek sekarang peneliti berfokus pada masalah yang ditemukan dalam Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo Jemaat Sentrum Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. Penerimaan keuangan gereja berdasarkan perpuluhan atau pemberian sukarela jemaat, persembahan hari minggu, persembahan ibadah BIPRA (Bapak, Ibu, Pemuda, Remaja,

dan Anak) serta ibadah lainnya. Sumber sumber penerimaan keuangan gereja ini yang dilihat jemaat bahwa begitu banyak penerimaan dan pengeluaran tetapi pelaporan keuangannya dan akuntabilitas keuangan gereja masih belum sesuai dengan firman Tuhan. Ada jemaat juga yang berpendapat bahwa keuangan gereja kalau tidak di laporkan berarti hanya pengurus dan pendeta gereja yang mengetahui jemaat tidak perlu mengetahui. Melihat banyaknya asumsi yang berkembang di jemaat makna pertanggung jawaban sebenarnya yakni kepada Yesus Tuhan dan Jemaat. Asumsi-asumsi seperti ini yang berkembang pada pola pikir jemaat sehingga jemaat sering kali mempertanyakan ada apa dengan keuangan gereja? Apakah tidak perlu dipertanggung jawabkan?

Penelitian Franchisca (2016) teori Stewardship menjelaskan bahwa Jemaat, Pendeta dan Pengurus gereja memiliki fungsi pengelola sumber daya yang ada baik sumber daya manusianya maupun keuangannya berdasarkan kepercayaan Jemaat dan teori ini juga menggambarkan hubungan pribadi dengan sesama yang kuat antara keberhasilan dan kepuasan. Akuntabilitas pelaporan keuangan gereja sangat dibutuhkan agar pola pikir jemaat tidak mengartikan bahwa keuangan gereja yang mengetahuinya hanya bendahara gereja atau bendahara sinode atau ketua jemaat dalam hal ini pendeta. Akan tetapi harus tetap melibatkan jemaat sebagai pengguna bendahara gereja yang mengelola dan tentu pelaporan tanggung jawab harus melibatkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dalam pengelolaannya artian harus dipertanggungjawabkan dengan

benar. Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti pada halnya pada gereja menjadi bagian dari entitas publik dan yang terpenting harus dipertanggungjawabkan ke publik juga.

Maria (2017) menjelaskan dalam aturan PSAK 45 revisi 2011 secara umum laporan keuangan entitas nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba PSAK no 45 revisi 2011 salah satu bentuk organisasi nirlaba yang wajib membuat laporan keuangan adalah organisasi gereja. Apabila keuangan gereja tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi penyimpangan dalam keuangan gereja seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 6: 10:

“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”.

Pengertian akuntabilitas secara tradisional menurut Roberta dan Scapens (1985) adalah suatu hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan dari sesuatu sebab yang dapat diterima secara akal sehat. Selanjutnya akuntansi menurut Siregar (2015) mendefinisikan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya. Dalam perspektif

gerejawi akuntabilitas keuangan gereja dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan terhadap Tuhan dan Jemaat. Pemimpin gereja diharuskan menjaga tangannya agar tetap bersih dalam hal keuangan dan bersedia setiap saat untuk diaudit dari awal sampai akhir pelayanannya. Hal tersebut disampaikan oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel 12:3-5 menegaskan perilaku pemimpin gereja yang benar dalam hal pengelolaan keuangan gereja:

“(3) Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.” (4) Jawab mereka: “Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun.” (5) Lalu berkatalah ia kepada mereka: “TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku.” Jawab mereka: “Dia menjadi saksi.”

Akuntabilitas keuangan gereja juga tidak sebatas pertanggung jawaban pada jemaat akan tetapi paling besar pertanggung jawabannya kepada Yesus Kristus. Pada dimensi teologi, akuntabilitas oleh Yesus ditekankan akan kesetiaan dan kejujuran dalam mengurus segala sesuatu secara benar dan jujur termasuk hal keuangan. Yesus mengatakan:

“Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan

jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartanya sendiri kepadamu?” (Lukas 16: 10-12)”.

Hal itu berarti kesetiaan dan kejujuran menjadi unsur yang harus dimiliki setiap pengelola organisasi yang menjadi penggerak cikal bakal akuntabilitas dan menjadi komitmen dalam ajaran kristiani. Perbandingan pengelolaan keuangan gereja katolik dan protestan sangat banyak perbedaan, walaupun pada hakekatnya pertanggung jawabnya sama terhadap Yesus Kristus akan tetapi dalam akuntabilitas sudah transparan dan baik hanya makna dan kajiannya berbeda. Akuntabilitas dalam lingkup keuangan gereja bukan pada pelayanan dengan melakukan pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian. Tetapi bagaimana pengurus ataupun Pendeta dalam sebuah gereja dapat mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Tuhan dan Jemaat.

Anggapan yang muncul dari Jemaat muncul karena Jemaat berpikir bahwa keuangan Gereja tidak dipertanggungjawabkan ke Jemaat karena adanya pengaruh dari para pemimpin sebelumnya dan budaya yang turun temurun dari gereja. Anggapan lain yang muncul dalam Jemaat, beranggapan bahwa uang Gereja kepunyaan atau milik pendeta. Anggapan anggapan ini muncul karena Jemaat melihat pengelolaan keuangan Gereja yang dilakukan pertanggung jawabannya sangat minim. Pernyataan serupa diutarakan oleh Dwi (2015) dengan persepsi bahwa gereja kadang diidentikkan dengan pendeta atau milik pendeta serta dianggap sebagai penyalur jasa, sehingga gereja bukan hanya tempat

ibadah tetapi sebagai sebuah perusahaan keluarga. Kegagalan gereja dalam membangun kepemilikan umat dan gereja itu sendiri sebenarnya berawal dari pribadi yang tidak memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian umat suatu gereja. Karena itu, untuk membangun sebuah kepercayaan harus didukung oleh visi dan misi dari gereja itu sendiri yaitu dengan memberitakan ajaran Tuhan serta untuk menanamkan konsep bahwa gereja adalah “milik bersama” sehingga diperlukan sebuah mekanisme akuntabilitas yang transparan bagi publik. Libby dan Luft (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan seseorang, seseorang dengan akuntabilitas tinggi tentunya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya. Kondisi yang memungkinkan lemahnya pertanggung jawaban serta transparansi juga terdapat pada organisasi pemerintahan maupun swasta, sehingga dengan permasalahan tersebut membuat karyawan/pegawai tidak konsisten dengan pekerjaan dan aturan yang mengikat.

Akuntabilitas keuangan gereja Protestan sering terjadi perdebatan dikalangan jemaat yang memandang pengelolaannya tidak jelas penerimaannya dilihat hanya memberikan perpuluhan dari jemaat. Sedangkan pengeluarannya yang terjadi pada saat dilihat sangat beda dan dirasakan oleh jemaat untuk pengembangan pelayanan dan peribadatan sangat minim dirasakan dikarenakan pengelolaannya yang masih bermasalah atau pengelolaannya sebatas pertanggungjawaban terhadap manusia saja dengan menerapkan prinsip yang penting sudah

mengerjakan atau akuntabilitas berpedoman pada bahwa segala sesuatu yang dilakukan dilakukan dengan kasih dan tulus ikhlas serta yang terpenting akuntabilitas keuangan gereja benar-benar dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Yesus Kristus yang dimana sebagai kepala gereja dan pemilik segalanya dalam aspek berkehidupan dalam gerejawi dan segala kegiatnnya.

Penelitian oleh Randa (2011) tentang akuntabilitas keuangan gereja katolik di Tana Toraja pengelolaan keuangan gereja katolik dan pertanggung jawaban sudah baik dilakukan yang dimana pelaporan dana gereja sudah dilakukan secara transparan, berikut juga penelitian oleh Komang, dkk (2015) tentang konsep akuntabilitas keuangan gereja kerasulan baru menjelaskan tentang pengelolaan keuangan berbasis akuntansi teologi dan pelibatan keuangan gereja pusat pelaporannya sudah baik. Penelitian Janets, dkk (2011) penelitian tentang akuntabilitas keuangan gereja protestan dengan studi fenomenologis menjelaskan juga kesalahan dalam pelaporan terjadi karena adanya ketidakberesan administrasi karena majelis dan jemaat tidak saling menopang. Penelitian peenelitian terdahulu menggunakan metode studi fenomenologi dan studi kasus dan objek penelitiannya kebanyakan di gereja katolik dan pantekosta.

Dalam penelitian kali ini peneliti mencoba untuk melakukan metode yang berbeda dari sebelumnya dengan menggunakan paradigma Religi atau Spiritual dengan objek di Gereja Protestan karena penelitian

sebelumnya kebanyakan di Gereja Katolik dan Pantekosta selain itu juga peneliti menganggap bahwa keterkaitan akuntansi dan agama sangat diperlukan dalam hal khususnya pertanggung jawaban ke Jemaat bukan sekedar menggunakan aturan tentang PSAK no 45 tetapi Alkitab dan pelaporan ke Tuhan Yesus Kristus diperlukan juga sebagai hal utama untuk pelaporan.

Dengan demikian judul dalam penelitian ini yaitu **Akuntabilitas Keuangan Gereja Studi Pada Gereja GPIG Sentrum Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja pada Gereja GPIG Jemaat Sentrum Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk akuntabilitas keuangan gereja pada Gereja GPIG Jemaat Sentrum Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi gereja. Disamping itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengelola keuangan gereja serta pertanggung jawabannya (akuntabilitas) dalam hal pengelolaanya serta pertanggung jawabannya keuangan dalam hal ini keuangan gereja.